

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang luar biasa dengan beragam kekayaan alam, budaya, sejarah, dan keindahan alam yang mengagumkan. Kondisi ini menawarkan berbagai destinasi wisata yang menarik seperti pulau-pulau eksotis, taman nasional, situs bersejarah, dan berbagai kegiatan petualangan. Dalam mendukung dan membangun pariwisata yang berkelanjutan dan berdampak positif, maka kolaborasi antar pihak diperlukan. Kolaborasi memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan sukses. Pariwisata seringkali melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat setempat, dan organisasi non-pemerintah (Atmojo & Fridayani, 2021; Priatmoko et al., 2021). Ini dapat menjadi pendekatan yang diperlukan untuk wilayah di Indonesia yang memiliki potensi wisata yang menarik, khususnya di Yogyakarta.

Yogyakarta terkenal akan budaya dan pariwisatanya yang merupakan daerah tujuan wisata untuk berlibur menikmati suasana yang indah. Objek wisata yang tersebar di seluruh Kabupaten di Yogyakarta memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri yang merupakan salah satu kota yang memiliki potensi di industri pariwisata yang terdapat berbagai sumber daya alam termasuk hutan (Wijayanti & Damanik, 2019). Yogyakarta memiliki kawasan hutan dengan luas + 16.358,60 Ha (KPH Yogyakarta, 2019). Kawasan hutan dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY (KPH Yogyakarta, 2019). Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY tidak hanya sebagai pelaksana pengelola hutan tetapi sebagai pengendali.

Hutan lindung dapat dimanfaatkan menjadi potensi wisata (Bhammar et al., 2021). Seperti yang terdapat pada Peraturan Daerah (PERDA) DIY nomor 7 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa pengelolaan hutan lindung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi ekologi, ekonomi dan sosial. Pengelolaan hutan lindung dapat dilakukan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan masyarakat ataupun pihak swasta (Pemda, 2014). Potensi ini juga ada diberbagai wilayah di Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Bantul. Di Bantul terdapat objek wisata Bukit Lintang Sewu yang dikelola oleh Resort Pengelolaan Hutan (RPH) (Kristy et al., 2022).

Pengembangan pariwisata memang melibatkan seluruh spektrum masyarakat, dari pemerintah hingga swasta dan warga biasa. Namun, kunci kesuksesan dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi adalah dengan memberikan pemahaman yang jelas. Ketika warga lokal memahami manfaat positif yang dapat mereka peroleh dari pembangunan pariwisata, seperti peningkatan lapangan kerja, pendapatan, atau pelestarian budaya dan lingkungan, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya tersebut. Dalam konteks ini, edukasi dan komunikasi yang efektif menjadi kunci untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak (Manaf et al., 2018; Pons-Morera et al., 2018).

Sektor pariwisata juga memiliki peran strategis dalam mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi, terutama dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan (Winter & Kim, 2021). Oleh karena itu, kerjasama pemerintah dalam mengencarkan program pengembangan pariwisata sangatlah relevan. Ikut mengembangkan industri pariwisata yang berkelanjutan, itu mengindikasikan adanya upaya menciptakan lapangan pekerjaan baru, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pariwisata dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu, merangsang sektor-sektor terkait seperti

perhotelan, makanan, dan kerajinan, dan menggerakkan investasi yang dapat mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih baik (Brida et al., 2020; Manzoor et al., 2019).

Pariwisata juga tidak hanya dilihat dari aspek tertentu, tapi juga dilihat dari potensi alamnya, seperti hutan. Pariwisata yang memanfaatkan hutan sebagai daya tarik pengunjung, salah satunya adalah Bukit Lintang Sewu yang terletak di Dusun Karang Asem, Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta (Kristy et al., 2022). Bukit Lintang Sewu memanfaatkan keindahan hutan dan pemandangan alamnya dengan destinasi yang sangat mudah diakses, terletak di pinggir jalan Patuk Dlingo Km 4.5. Pengunjung akan disuguhkan dengan beragam pengalaman yang mampu menghilangkan kepenatan, mulai dari pemandangan alam yang memukau hingga matahari terbenam yang memukau ketika senja menjelang.

Bukit Lintang Sewu adalah destinasi wisata yang layak dikunjungi karena dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang memudahkan pengunjung seperti adanya mushola, toilet, gazebo, rumah pohon, warung makan, dan tempat parkir yang memadai. Selain itu, spot-spot foto menarik seperti gapura, gardu pandang, tugu Watu Asah, dan pintu kemana saja ala Doraemon akan memanjakan pengunjung (Kristy et al., 2022; Nugroho et al., 2021). Menikmati keindahan alam yang indah pengunjung hanya perlu membayar biaya masuk yang relatif terjangkau. Fasilitas yang lengkap dan biaya yang terjangkau, Bukit Lintang Sewu adalah destinasi wisata yang cocok untuk dikunjungi bersama keluarga atau teman-teman.

Bukit Lintang Sewu, sebagai salah satu destinasi wisata di Bantul, membutuhkan keterlibatan berbagai pihak terkait dalam pengembangannya agar dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta mengakselerasi pengembangan kawasan obyek wisata tersebut. Pihak-pihak yang berkontribusi dalam pengembangan wisata Bukit Lintang Sewu melibatkan pemerintah, termasuk KPH Yogyakarta dan Dinas Kota Yogyakarta yang berperan sebagai penyedia lahan dan pemberi bantuan.

Selain itu, sektor swasta juga turut serta dalam pengembangan ini, dengan berbagai hotel seperti Ros In Hotel, The 101 Hotel, Tara Hotel, Tjokro Hotel, dan Hotel Rohan yang menjadi pelaku utama dalam memberikan fasilitas penginapan bagi wisatawan. Adanya keterbatasan dalam kemampuan dan sumber daya mendorong pemerintah untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal dan aktor-aktor lainnya.

Perkembangan destinasi wisata, penting untuk memahami tren jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun.

Berikut merupakan jumlah kunjungan wisatawan Bukit Lintang Sewu dari tahun 2017-2018 :

**Tabel 1. 1**

**Data Kunjungan Wisatawan Bukit Lintang Sewu Tahun 2017-2018**

No	Bulan	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Januari	8	10.144
2	Februari	-	7.253
3	Maret	28	6.502
4	April	35	6.932
5	Mei	240	8.358
6	Juni	-	-
7	Juli	-	-
8	Agustus	-	-
9	September	143	-
10	Oktober	53	-
11	November	-	-
12	Desember	-	-

JUMLAH	507	39.189
--------	-----	--------

*Sumber: Statistic kepariwisataan 2017-2018*

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 jumlah pengunjung di Bukit Lintang Sewu sebanyak 507 pengunjung, pada tahun 2018 berjumlah 39.189 pengunjung. Perubahan yang signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan di Bukit Lintang Sewu terlihat bahwa tahun 2017 lebih sedikit dibandingkan tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan adanya keterlibatan atau kolaborasi antara pihak pemerintah yaitu PEMDA DIY, Dinas Lingkungan Hidup memberikan kompetensi dan kemampuan terhadap masyarakat dalam mengembangkan Bukit Lintang Sewu.

Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *Collaborative Governance* dalam pengembangan wisata Bukit Lintang Sewu Di Balai KPH Yogyakarta Tahun 2017-2018 karena penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan pengembangan wisata lebih membahas dari segi peran dinas pariwisata, pihak swasta dan pengelola wisata dalam pengembangan wisata, selain itu hanya membahas strategi yang diterapkan. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terdapat kolaborasi antara pemerintah daerah yaitu Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan pihak swasta dalam pengembangan wisata di Bukit Lintang Sewu.

Perlu adanya kolaborasi yang terjalin karena pemerintah daerah mempunyai peran yang cukup luas guna membangun kolaborasi dengan pengelola wisata yang ada di Bukit Lintang Sewu. Kolaborasi yang baik akan sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan dari suatu usaha pengembangan tersebut dalam peningkatan baik dari perekonomian maupun peluang untuk tenaga kerja itu sendiri. Selain itu terdapat pihak ketiga, Pihak Swasta dengan program yang ditujukan dan diharapkan dapat membantu untuk pengembangan wisata di Bukit Lintang Sewu.

Selain itu, terdapat keterbatasan yang signifikan yang dihadapi oleh pemerintah pada umumnya dalam mengembangkan pariwisata, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas. Keterbatasan anggaran seringkali menghambat kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dana yang memadai untuk pengembangan infrastruktur, promosi pariwisata, dan pelatihan tenaga kerja. Sementara itu, keterbatasan sumber daya manusia membuat pemerintah kesulitan dalam mengelola destinasi wisata dengan efisien dan efektif. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pihak swasta dan pengelola wisata lokal menjadi sangat penting guna memperluas kapasitas dan daya jangkau dalam pengembangan pariwisata.

Dalam *collaborative governance*, pemerintah dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang dimiliki oleh pihak swasta untuk mendukung proyek-proyek pariwisata yang sedang dikembangkan. Pihak swasta juga dapat membantu dalam hal pembiayaan dan investasi, yang mungkin tidak dapat sepenuhnya diakomodasi oleh anggaran pemerintah. Sejalan dengan itu, pengelola wisata lokal dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kondisi lokal, kebutuhan wisatawan, dan kearifan lokal, yang secara signifikan akan meningkatkan daya tarik dan pengalaman pengunjung di Bukit Lintang Sewu. Berdasar pada hal tersebut, kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, pengelola wisata, dan pihak lainnya menjadi strategi yang efektif dalam mengatasi keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengembangan pariwisata.

Jika pariwisata dikelola dengan baik maka akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat yakni secara sosial, budaya dan ekonomi. Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai ***Collaborative Governance dalam pengembangan wisata Bukit Lintang Sewu tahun 2017 – 2018.***

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Collaborative Governance* dalam pengembangan wisata Bukit Lintang Sewu Tahun 2017-2018 ?
2. Faktor apa saja yang mendukung *Collaborative Governance* dalam pengembangan wisata Bukit Lintang Sewu Tahun 2017-2018?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji sejauh mana konsep *Collaborative Governance* telah diterapkan dalam pengembangan wisata Bukit Lintang Sewu selama periode 2017-2018.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung kerjasama antar-*stakeholder* dalam pengembangan wisata tersebut. Ini mencakup aspek-aspek seperti komunikasi yang efektif, kepemimpinan kolaboratif, regulasi yang mendukung, dan pengelolaan sumberdaya bersama.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat antara lain sebagai berikut :

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran tentang penerapan kolaborasi pemerintah dalam pengembangan wisata Bukit Lintang Sewu pada Tahun 2017-2018.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada masyarakat dan khususnya pihak pemerintah yang bersangkutan dalam rangka kolaborasi pemerintah dalam pengembangan wisata

sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti dengan tema atau topik ini.

- b. Memberikan masukan serta evaluasi bagi pemerintah yang bersangkutan tentang kolaborasi pemerintah dalam pengembangan wisata Bukit Lintang Sewu Tahun 2017-2018.

### **1.5 Studi Terdahulu**

Peneliti telah menganalisis studi terdahulu dengan menemukan beberapa perbedaan dalam hasil penelitian. Hasil penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa meskipun upaya *collaborative governance* telah diinisiasi dalam pengembangan desa wisata di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, namun belum mencapai tingkat optimal. Terdapat beberapa indikator *collaborative governance* yang belum terpenuhi sepenuhnya. Kurangnya peraturan resmi yang mengikat para pihak, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta fasilitas sarana prasarana yang kurang memadai, serta kurangnya kepercayaan di antara *stakeholder*, semuanya menjadi kendala dalam pelaksanaan kolaborasi. Faktor-faktor lainnya yang menghambat kolaborasi ini mencakup aspek budaya, institusi, dan politik (Risanti & Winarni, 2018).

Studi lainnya juga menjelaskan bahwa untuk memenuhi prasyarat terbentuknya masyarakat kolaboratif dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata, perlu diterapkan model pengelolaan berbasis komunitas. Implementasi model ini membawa sejumlah manfaat, tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dalam konteks keberlanjutan wisata Kiluan dan pelestarian lingkungan sekitar. Sub-sistem yang mendukung pembentukan masyarakat kolaboratif berbasis komunitas melibatkan penguatan modal sosial, penguatan mekanisme pengambilan keputusan lokal, penguatan kelembagaan masyarakat setempat, serta mengeksplorasi potensi pariwisata Kiluan yang ada (Tresiana & Duadji, 2017).



Studi lainnya dalam fokus pada pengembangan objek wisata Horti Park Lampung juga menjelaskan bahwa pengembangan harus dilakukan secara sistematis, di mana studi ini menegaskan bahwa hal tersebut telah dimulai dengan tahap awal, termasuk tersedianya lahan, peluncuran proyek, pengangkatan tenaga harian lepas (THL), dan pengalokasian sumber dana. Kolaborasi antara berbagai *stakeholders* juga telah dimulai dengan baik. Namun, masih ada beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya dalam berkolaborasi, kesejahteraan masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi, dan kekurangan sarana serta prasarana yang masih perlu ditingkatkan dalam pengembangan Horti Park Lampung (Sari, 2018).

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa Model *Collaborative Governance* yang diterapkan di Desa Budaya Brosot memiliki kesamaan secara umum dengan Model *Collaborative Governance* yang telah dijelaskan oleh Ansel dan Gash. Namun, ada sejumlah faktor budaya yang mempengaruhi pelaksanaan *Collaborative Governance* di Desa Budaya Brosot. Faktor-faktor ini mencakup hubungan kekerabatan yang kuat, tradisi arisan, fleksibilitas waktu (jam karet), musyawarah mufakat sebagai prinsip pengambilan keputusan, nilai "nggih ra kepanggih" yang menekankan keseimbangan, serta praktek gotong royong, swadaya, mokogi, ngombyongi, dan mosobodoa. Faktor budaya paternalistik dan orientasi pada hubungan antarpribadi juga memengaruhi cara pelaksanaan *Collaborative Governance* di desa ini (Sambodo & Pribadi, 2016).

Penelitian lainnya juga menemukan bahwa dalam pengembangan suatu obyek wisata diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat, terutama ketika obyek wisata tersebut menghadapi hambatan, seperti infrastruktur yang belum memadai. Melalui kerja sama yang erat, semua pihak dapat berkontribusi untuk meningkatkan fasilitas dan layanan di obyek wisata tersebut, sehingga pengalaman wisatawan menjadi lebih baik. Kolaborasi juga dapat membantu dalam mencari solusi terbaik untuk mengatasi hambatan-

hambatan yang dihadapi, sambil memastikan bahwa pengembangan pariwisata tetap berkelanjutan dan merata dalam manfaatnya bagi masyarakat setempat (Zaenuri, 2018).

Adapun hasil penelitian lainnya menjelaskan bahwa indikator seperti komunikasi langsung, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, berbagi pemahaman, dan hasil-hasil intermediat, memainkan peran penting dalam menilai kualitas dan efektivitas dari proses *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata edukasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa semua indikator tersebut mendukung kelancaran dan keberhasilan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan Jogja Exotarium (Hakim et al., 2019).

Temuan dari studi lainnya menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kolaborasi telah berjalan sesuai harapan, menciptakan kerangka kerja yang efektif. Namun, terdapat beberapa indikator yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaannya, seperti tingkat komitmen terhadap tujuan bersama, tingkat kepercayaan antara *stakeholder*, dan akses terhadap sumber daya yang masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi yang muncul adalah perlunya kebijakan koordinasi yang lebih kuat untuk mengarahkan semua pihak ke arah tujuan bersama. Kepercayaan antara pihak-pihak terlibat juga menjadi kunci penting dalam memastikan keberhasilan kolaborasi. Selain itu, kontribusi finansial dari pemerintah juga diperlukan agar kolaborasi dalam pengelolaan wisata berjalan dengan optimal (Putra, 2018).

Hasil penelitian mengenai kolaborasi ABCGM+ dalam pengembangan pariwisata di desa Nglanggeran menunjukkan bahwa ada kolaborasi yang terbentuk antara enam pemangku kepentingan terkait. Namun, peran sentral dalam mendorong pengembangan pariwisata di desa Nglanggeran dimainkan oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Sinergi antara setiap pemangku kepentingan tidak terlepas dari kehadiran Pokdarwis yang menjadi motor penggerak utama. Temuan penting lainnya adalah bahwa wisatawan (*traveler*) juga memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pariwisata, baik melalui promosi tidak langsung

yang mereka lakukan maupun sebagai sumber pendapatan bagi desa wisata Nglanggeran (Nurhadiyanti, 2019).

Hasil penelitian lainnya menggambarkan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros dengan konsep agro silvo fishery telah dimulai oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pihak utama yang diberdayakan dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove. Dalam skenario ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator, sementara sektor swasta berfungsi sebagai mitra yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat. Meskipun demikian, proses *collaborative governance* belum berjalan secara optimal, ditandai dengan beberapa hambatan yang masih ada, seperti kurangnya forum komunikasi formal, adanya ego sektoral, keterbatasan sumber daya, dan keterlibatan swasta yang belum sepenuhnya maksimal dalam upaya pengembangan Konservasi Mangrove Baros (Arianti & Satlita, 2018).

Hasil penelitian lainnya menyoroti peran pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Tamansari, antara lain Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Kepala Desa Patehan, akademisi, pengelola desa wisata, dan penyedia layanan pariwisata. Pola kerja sama yang terbentuk melibatkan pemerintah dalam bentuk bimbingan serta kolaborasi antara akademisi dan masyarakat dalam bentuk studi. Namun, kendala yang muncul dalam proses kolaboratif ini adalah adanya fasilitasi eksklusif dan kepemimpinan institusional yang menjadi hambatan dalam pengembangan Desa Wisata Tamansari (Saputra, 2020).

**Tabel 1. 2 Studi Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Ringkasan
----	---------	-------	-----------

1.	Risanti & Winarn, (2018)	<p><i>Collaborative Governance</i> dalam pengembangan Desa Wisata Wukirsari di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul</p>	<p><i>Collaborative Governance</i> dalam pengembangan desa wisata di Desa Wukirsari dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa, Pokdarwis, Pengelola desa wisata, masyarakat dan Swasta (LSM, Bank serta Perguruan Tinggi) belum optimal. Menurut analisis ada delapan faktor pengukur keberhasilan kolaborasi yang tidak tercapai. Faktor penghambat berasal dari faktor budaya dan dari faktor politik.</p>
2.	Novita Tresiana dan Noverman Duadji, (2017)	<p>Kolaboratif Pengelolaan Pariwisata Teluk Kiluan</p>	<p>Implementasi model berbasis masyarakat di dasari oleh banyak keuntungan yang diperoleh bukan saja ekonomi, tetapi jauh lebih penting adalah keberlanjutan dari wisata Kiluan serta kelestarian di sekitar lingkungan pariwisata.</p>

3.	Meika Permata Sari, (2019)	<p><i>Collaborative Governance</i> dalam pengembangan objek wisata Horti Park Lampung di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan</p>	<p>Pengembangan objek wisata Horti Park Lampung Kondisi awal yang dimulai dari tahap tersedianya lahan sebagai praktek <i>collaborative governance</i>, launching Horti Park Lampung, pengangkatan THL, sumber dana yang digunakan, bergabungnya <i>stakeholders</i> ke Horti Park Lampung telah dilaksanakan dengan baik meskipun sementara masih terdapat hambatan seperti keterbatasan Sumberdaya dalam berkolaborasi, Kesejahteraan belum terpenuhi secara sepenuhnya dan Sarana dan prasarana belum mencukupi.</p>
4.	Giat Tri Sambodo dan	<p>Pelaksanaan <i>Collaborative Governance</i> di Desa</p>	<p>Pelaksanaan <i>Collaborative Governance</i> di Desa Budaya Brosot dipengaruhi oleh Starting</p>

	Ulung Pribadi, (2016)	Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta	<p><i>Condition, Institutional Design, dan Facilitative Leadership.</i></p> <p>Pada pelaksanaan <i>Collaborative Governance</i> di Desa Budaya Brosot faktor <i>Starting Condition, Institutional Design, dan Facilitative Leadership</i> serta <i>Collaborative Process</i>, juga dipengaruhi oleh faktor budaya seperti Hubungan Kekerabatan, Arisan, Jam Karet, Musyawarah Mufakat dan nggih ra kepanggih, Ngaruhke, Gotong royong dan Swadaya serta Mokogi, Ngombyongi, dan Mosobodoa, Paternalistik, dan yang terakhir OSIS yang artinya Orangnya Sekitar Itu itu Saja, Di Desa Budaya Brosot.</p>
5.	Muchamad Zaenuri, (2018)	Pengelolaan Pariwisata Bencana Berbasis <i>Colaborative Governance</i>	Di Kabupaten Sleman dalam melaksanakan kebijakan sudah sesuai dengan RPJP, RPJM dan Renstra yang berkaitan dengan pariwisata. Dari kunjungan

			<p>wisata sangat dipengaruhi oleh adanya bencana, pada saat terjadi bencana angka kunjungan wisata turun sangat drastis.</p> <p>Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Volcano Tour Merapi sebagai salah satu ODTW di Kabupaten Sleman sangat baik. Model pengelolaan pariwisata-bencana berbasis <i>collaborative governance</i> dari segi <i>shared vision</i> lebih banyak menekankan pada hubungan yang bersifat komando antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat dan pengelolaan pariwisata bencana berbasis <i>collaborative governance</i> dari segi partisipasi diwarnai hubungan yang bersifat koordinasi, baik kepada swasta maupun masyarakat.</p>
--	--	--	---

6.	Arif Rahman Hakim, Muchamad Zaenuri, Helen Dian Fridayani, (2019)	<i>Collaborative governance in managing educative tourism of jogja exotarium in sleman regency 2019</i>	Peran antara <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan wisata edukasi Jogja Exotarium di Kabupaten Sleman adalah pihak pemerintah sebagai kontrol atas pengelolaan wisata edukasi, masyarakat sebagai karyawan, dan pihak swasta sebagai pengelola wisata. Adapun proses <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan wisata edukasi menggunakan 5 indikator yang digunakan untuk mengukur <i>collaborative governance</i> sudah baik, akan tetapi kolaboratif yang dilakukan tingkatnya masih awal yang artinya merugikan pemerintah, karena pemerintah belum bisa ikut campur terlalu jauh dalam pengelolaan wisata tersebut. Padahal jika sudah berbagi resiko dan ada keterlibatan pemerintah secara implementasi, akan
----	---	---	--



			menguntungkan pihak pemerintah.
7.	Dimas Adi Putra, (2018)	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengelolaan Objek Wisata Gua Pindul	Indikator keberhasilan kolaborasi dapat disimpulkan bahwa 1. Struktur jaringan sudah berjalan dengan baik 2. Komitmen Terhadap Tujuan belum berjalan dengan baik karena masih ada ego dari masing-masing pihak 3. Adanya Saling Percaya Diantara Para Pelaku .Munculnya rasa kurang percaya diakibatkan dari kurangnya komunikasi dan masih tingginya ego dari pelaku kolaborasi. 4. <i>Governance</i> Dalam indikator <i>governance</i> sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa kendala. 5. Akses Terhadap Kewenangan Dari indikator akses terhadap kewenangan sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa

			<p>kendala 6. Pembagian <i>Akuntabilitas / Responsibilitas</i> keterlibatan dari masing-masing <i>stakeholder</i> untuk berbagai keputusan sudah dilakukan, masing-masing dari <i>stakeholder</i> selalu memberikan laporan atau pertanggung jawaban terhadap semua kegiatan atau keputusan yang sudah dijalankan. 7. Berbagi Informasi sudah berjalan dengan baik sudah ada kemudahan bagi anggota dalam mengakses informasi. 8. Akses Terhadap Sumberdaya belum bisa optimal karena sumber dana yang digunakan dalam kolaborasi ini masi sangat terbatas hanya mengandalkan dari swadaya masyarakat, sedangkan pemerintah hanya memberikan kontribusi di bidang perizinan saja sehingga</p>
--	--	--	---

			diperlukan akses keuangan dari sumber lain.
8.	Nurhadiyanti, (2019)	Kolaborasi ABCGM+  Dalam  Pengembangan  Pariwisata Desa  Nglanggeran  Kecamatan Patuk  Kabupaten Gunung  Kidul Tahun 2018	Terjadi kolaborasi diantara (enam) <i>stakeholder</i> terkait.  Namun <i>stakeholder</i> kunci yang menjadi aktor penggerak dalam pengembangan pariwisata di desa Nglanggeran adalah Pokdarwis. Sinergitas yang terjadi di antara tiap-tiap <i>stakeholder</i> tersebut tidak lepas dari adanya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) tersebut.  Temuan lainnya yaitu ternyata wisatawan mempunyai kontribusi yang lebih dalam hal pengembangan pariwisata melalui <i>indirect promotion</i> yang mereka lakukan dan sebagai sumber pendapatan dari desa wisata Nglanggeran.
9.	Devi Arianti dan Lena Satlita, (2018)	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengembangan	Menggunakan konsep agro silvo fishery yaitu kegiatan pertanian, perikanan dalam kawasan hutan

		<p>Konservasi Mangrove Baros Di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul</p>	<p>mangrove bertujuan ekologi dan ekonomi. Secara ekologi melaksanakan konservasi mangrove dan usaha peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pertanian dan perikanan. Pada pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang dihadapi.</p>
10.	<p>Deden Saputra, (2020)</p>	<p>Tata Kelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku kepentingan yang berperan langsung dalam pengembangan pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Kepala Desa Patehan, akademisi, pengelola desa wisata, dan penyedia layanan pariwisata. Pola kerja sama antara pemerintah dan masyarakat berbentuk bimbingan, sedangkan kerja sama antara akademisi dan masyarakat berbentuk studi. Fasilitasi eksklusif dan</p>

			kepemimpinan institusional menjadi hambatan dalam proses kolaboratif pengembangan Desa Wisata Tamansari.
--	--	--	---

Hasil penelitian yang telah diuraikan menggambarkan berbagai aspek kolaborative *governance* dalam pengembangan pariwisata di berbagai konteks dan lokasi. Meskipun upaya kolaboratif telah diinisiasi dalam berbagai kasus tersebut, masih terdapat beberapa indikator kolaborative *governance* yang belum mencapai tingkat optimal. Beberapa hambatan yang sering muncul meliputi kurangnya peraturan resmi yang mengikat para pihak, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta fasilitas sarana prasarana yang belum memadai. Selain itu, kurangnya kepercayaan di antara *stakeholder* dan adanya faktor-faktor budaya, institusi, dan politik juga memengaruhi pelaksanaan kolaborasi.

Meskipun demikian, temuan-temuan ini juga menunjukkan potensi besar dalam kolaborative *governance* dalam pengembangan pariwisata. Dengan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pihak swasta, akademisi, dan masyarakat, pengembangan pariwisata dapat menjadi lebih berkelanjutan dan merata dalam manfaatnya. Diperlukan komunikasi yang kuat, komitmen terhadap tujuan bersama, serta kepercayaan di antara stakeholder untuk mencapai hasil yang optimal. Pemerintah juga dapat berperan dalam memberikan dukungan finansial dan regulasi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kolaborative *governance* dalam pengembangan pariwisata. Melalui upaya kolaboratif yang lebih baik, diharapkan pengembangan pariwisata dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat dan lingkungan sekitar.

Hasil penelitian sebelumnya memiliki perbedaan yang lebih mengkaji keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas dan anggaran sehingga penelitian ini dilaksanakan dengan

memiliki kebaruan dalam hal analisis data yang menggunakan alat bantu analisis NVivo 12 Plus sehingga data yang disajikan menghasilkan kebaruan data dengan menghasilkan perhitungan otomatis dan menemukan antara semua data yang terkait, serta dapat menemukan kata-kata yang sering muncul dari temuan atau menampilkan istilah yang sering dibahas menggunakan fitur *Word Cloud* dalam bentuk gambar yang merupakan hasil sinkronisasi data dengan Kerangka teoritis penelitian. Kesesuaian teori yang digunakan pada kajian penelitian yang mencakup Aktor dan *Stakeholder*, komunikasi, Kepemimpinan Kolaboratif, Peraturan dan Kebijakan, dan sumber daya akan mendukung pelaksanaan mengenai *Collaborative Governance* dalam pengembangan wisata Bukit Lintang Sewu tahun 2017 – 2018.

## **1.6 Kerangka Dasar Teori**

### **1. Governance**

#### **a. Definisi Governance**

*Governance* adalah proses pembuatan kebijakan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan melibatkan negara / pemerintah, sektor privat maupun masyarakat madani dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. *Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Terdapat tiga pilar *governance* yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Driessen et al., 2012). Sementara itu, paradigma pemerintahan sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan.

Konsep *governance* menegaskan bahwa pemerintah hanyalah sebagai salah satu aktor yang ikut dalam proses *governance* dan tidak harus menjadi aktor yang paling menentukan, dalam implikasinya peran dari pemerintah penyedia pelayan publik atau

pembangun infrastruktur yang bisa jadi akan bergeser menjadi pendorong sebagai pihak yang memfasilitasi pihak lain atau sektor swasta yang memiliki peran aktif dalam mewujudkan upaya kebijakan atau program tersebut (Fasenfest, 2010).

Chris Ansell dan Alison Gash mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *collaborative governance* adalah sebuah tata kelola pemerintahan dimana institusi-institusi pemerintahan secara langsung melibatkan aktor di luar pemerintah (baik masyarakat/ komunitas, NGOs, dan *private sector*) di dalam proses pengambilan keputusan secara formal, yang berorientasi pada kepentingan bersama. Tujuannya adalah untuk melaksanakan kebijakan dan mengelola program dan sumber daya secara bersama (Sambodo & Pribadi, 2016). Perspektif *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008) ada beberapa kata kunci penting yang harus dicatat yaitu:

- a. kerjasama diinisiasi oleh institusi pemerintahan,
- b. adanya keterlibatan aktor non-pemerintah,
- c. seluruh aktor terlibat dalam proses pengambilan kebijakan,
- d. forum kerjasama diorganisir dan dirancang secara bersama,
- e. tujuan dari forum kerjasama adalah untuk membuat keputusan bersama-sama, dan
- f. fokus dari kerjasama adalah dalam pengemabilan kebijakan dan tatakelola pemerintahan.

*Governance* memandu proses yang mempengaruhi keputusan dan prosedur dalam sektor privat, publik dan sipil. Sedangkan *United Nations Development Programme (UNDP)* berpendapat bahwa *Governance* sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. *Governance* meliputi 3 intitusi yaitu sebagai berikut: *state* (pemerintah), *society* (masyarakat), dan *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha)

*Governance* adalah pelaksana fungsi *governing* yang secara bersama-sama pihak pemerintah dengan pihak instansi-instansi lainnya seperti LSM, perusahaan dan pihak lainnya dalam pengambilan keputusan, ataupun pelaksanaan program maupun kebijakan publik hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya dimiliki pemerintah atau menjadi urusan dari pemerintah, perspektif *governance* mengimplikasikan terjadinya pengurangan peran pemerintah, pemerintah sebagai institusi tidak bisa ditinggalkan begitu saja (Dwiyanto, 2006). Dwiyanto juga menjelaskan bahwa dimensi pertama dari *governance* adalah dimensi kelembagaan yang menjelaskan bahwa *governance* merupakan sebuah sistem yang melibatkan banyak pelaku (*multi stakeholders*), baik dari pemerintah maupun dari luar pemerintah dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan untuk menanggapi masalah dan kebutuhan publik (Dwiyanto, 2006).

Dimensi kedua dari *governance* adalah nilai yang menjadi dasar dalam penggunaan kekuasaan. Nilai-nilai administrasi publik yang tradisional seperti efisiensi dan efektifitas telah bergeser menjadi nilai keadilan sosial, kebebasan dan kemanusiaan. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa *Governance* adalah sistem kelembagaan yang memberi respon terhadap berbagai masalah publik yang muncul di masyarakat yang melibatkan banyak pelaku baik dari pemerintah dan kelompok kepentingan dalam proses formulasi serta diimplementasikan untuk mencapai tujuan dan atau menyelesaikan masalah bersama (Dwiyanto, 2006).

Bergesarnya paradigma dari *government* menjadi ke arah *governance*, menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik disebut dengan pemerintahan yang baik.



Terdapat lima prosisi mengenai *governance* yaitu:

- 1) *Governance* merujuk kepada institusi dan aktor,
- 2) *Governance* mengidentifikasi adanya kaburnya batas-batas dan tanggungjawab mengatasi isu sosial dan isu ekonomi,
- 3) *Governance* mengidentifikasi adanya ketergantungan hubungan antara institusi terlibat
- 4) *Governance* adalah mengenai *self-governing* otonom dari aktor-aktor,
- 5) *Governance* menyadarkan untuk memperbaiki sesuatu tidak perlu bergantung kepada kekuasaan pemerintah melalui perintah dan kewenangannya.

Upaya pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha swasta melalui peningkatan partisipasi dan kemitraan juga dilakukan pemerintah dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan kolaborasi. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang melibatkan tiga aktor utama *governance* yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat (Nur & Husen, 2022).

Maka dengan demikian, berdasarkan beragam uraian sebelumnya di atas, maka *governance* adalah konsep yang menggambarkan sebuah paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan, di mana tidak hanya pemerintah yang menjadi pemegang kendali utama. Paradigma sebelumnya, yang dikenal sebagai "*government*," menggambarkan pemerintah sebagai satu-satunya entitas yang menjalankan fungsi pemerintahan. Namun, dalam *governance*, peran pemerintah berada dalam konteks kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat madani. Ini menciptakan dinamika baru dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program, di mana peran pemerintah bisa menjadi *fasilitator*, pendorong, atau mitra dalam mencapai tujuan bersama.

*Governance* menekankan prinsip-prinsip seperti partisipasi, keterbukaan, keadilan sosial, dan kemanusiaan dalam penggunaan kekuasaan dan sumber daya.

Pada konteks *collaborative governance*, terdapat beberapa elemen kunci yang memainkan peran penting, termasuk aktor dan *stakeholder* yang berperan dalam proses pembuatan kebijakan, komunikasi yang efektif antara pihak-pihak terkait, kepemimpinan kolaboratif yang mendorong kerjasama, peraturan dan kebijakan yang mengatur kerangka kerja kolaboratif, serta sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Konsep ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktor di luar pemerintah, seperti masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Kesemuanya ini bersama-sama membentuk paradigma *governance* yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika kompleks dalam masyarakat modern.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut menurut peneliti, *governance* adalah proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan membutuhkan kerjasama antar pihak terkait. Kerjasama tersebut meliputi pendekatan kolaborasi yaitu meliputi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

#### ***b. Collaborative Governance***

*Collaborative Governance* adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk

berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat (Emerson et al., 2012).

*Collaborative Governence* sebagai proses dan stuktur dari pengambilan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan dengan melibatkan masyarakat, swasta, dari berbagai institusi dan level yang ada untuk menentukan tujuan bersama yang sulit untuk bisa dirumuskan sendiri (Cao et al., 2022; Emerson et al., 2012; Woldesenbet, 2020). *Collaborative Governance* adalah konsep di dalam management pemerintahan sebagai proses fasilitasi dan pelaksanaan oleh berbagai institusi baik pemerintah, masyarakat yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah bersama yang tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi pemerintah saja (Anriani et al., 2021; Arsandi, 2022).

*Collaborative Governance* adalah kerjasama yang memiliki makna bekerjasama atau bekerja bersama-sama dengan pihak lain, baik sifatnya individu, kelompok, maupun organisasi. Kolaborasi biasa diartikan sebagai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab dimana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, serta berbasis masyarakat (Bark et al., 2021; Leach et al., 2002).

Kolaborasi dalam pengelolaan obyek wisata bukit lintang sewu dikarenakan hubungan saling ketergantungan antar pihak yang bersangkutan. Pengelolaan obyek wisata Bukit Lintang Sewu tidak dapat dijalankan oleh satu pihak saja karena untuk melaksanakannya melibatkan berbagai pihak dan bidang yang berbeda-beda seperti keuangan, pelatihan, pemasaran, dan pembinaan sehingga ini dilakukan oleh beberapa pihak dengan kewenangan masing-masing.

*Collaborative governance* memunculkan sifat adaptif terhadap satu persoalan yang menuntut pemecahan berbagai berbagai pihak atau instansi terhadap suatu persoalan yang bisa dibawa kedalam bentuk-bentuk *collaborative governance* yang bervariasi antara lain:

manajemen, komunikasi, keterlibatan wakil rakyat, negosiasi, regulasi, dan bentuk kolaborasi lainnya yang mencakup berbagai *stakeholder* yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program ataupun kebijakan. Ukuran Keberhasilan Kolaborasi (Putro 2014: 29-35) menyebutkan bahwa terdapat delapan item penting yang bisa dijadikan untuk mengukur keberhasilan sebuah *network* atau kolaborasi dalam *governance*, yang meliputi :

- 1) Jenis struktur jaringan mendeskripsikan secara konseptual keterkaitan antar elemen satu dengan yang lain menyatu secara bersamaan untuk menjelaskan beberapa unsur fisik jaringan yang kaitnya dengan bentuk *networked structure*, seperti *clusture* dan *spoke* yang digunakan.
- 2) Komitmen Terhadap Tujuan Komitmen terhadap tujuan mengacu pada alasan mengapa sebuah *network* atau jaringan harus ada. Alasan mengapa sebuah *network* harus ada adalah karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif. Tujuan tujuan ini biasanya teraktulisasikan kedalam misi umum suatu organisasi pemerintah.
- 3) Adanya saling percaya diantara para pelaku/peserta yang terangkai dalam jaringan Kepercayaan diantara para partisipan didasarkan pada hubungan profesional atau sosial, keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha dari *stake holder* lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama.
- 4) *Governance* kejelasan dalam tata kelola termasuk *boundary* dan *exclusivity*, *rules*, *self determination*, dan *network manajemen*. *Boundary* dan *exclusivity* menegaskan siapa yang termasuk anggota dan siapa yang bukan termasuk anggota, harus ada kejelasan siapa saja yang termasuk dalam jaringan dan siapa yang ada di luar jaringan. *Rules* berkaitan dengan aturan-aturan yang menegaskan sejumlah pembatasan perilaku anggota komunitas dengan ancaman bahwa mereka akan

dikeluarkan jika perilaku mereka menyimpang atau tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. *Self determination* yaitu kebebasan untuk menentukan bagaimana *network* atau kolaborasi akan dijalankan dan siapa saja yang diijinkan untuk menjalankannya. *Network management* berkaitan dengan resolusi penolakan/tantangan, alokasi sumber daya, kontrol kualitas, dan pemeliharaan organisasi. Ciri sebuah kolaborasi yang efektif adalah jika kolaborasi didukung sepenuhnya oleh semua anggota *network* tanpa konflik dan pertentangan dalam pencapaian tujuan.

- 5) Akses terhadap kewenangan Akses terhadap otoritas yakni tersedianya standar-standar ketentuan prosedur-prosedur yang jelas yang diterima secara luas. Dari kebanyakan kolaborasi memberikan otoritas untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan dalam menjalankan tugasnya.
- 6) Pembagian *akuntabilitas/responsibilitas* yakni berbagi *governance* (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan *stakeholder* lainnya) dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan, dengan demikian berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- 7) Berbagi informasi yaitu kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan *privacy*, dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudahan akses ini bisa mencakup sistem, *software* dan prosedur yang mudah dan aman untuk mengakses informasi.
- 8) Akses terhadap sumber daya yakni ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan *network*.

*Collaborative Governance* adalah sebuah konsep yang melibatkan kerjasama, interaksi, dan kompromi antara berbagai elemen yang terlibat dalam sebuah proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Hal ini mencakup

individu, lembaga, dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu masalah atau kebijakan tertentu.

Nilai-nilai yang mendasari kolaborasi ini mencakup tujuan bersama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses bersama, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang, dan pendekatan berbasis masyarakat. *Collaborative Governance* melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang sulit dicapai jika dilakukan oleh satu entitas pemerintah saja.

## **2. Pengembangan Wisata**

Pengembangan adalah cara atau hasil kerja mengembangkan. Mengembangkan berarti membuka, memajukan, menjadikan maju dan bertambah baik. Pengembangan pariwisata dapat diartikan usaha atau cara untuk menjadi lebih baik segala sesuatu yang dapat dilihat dan dinikmati oleh masyarakat sehingga semakin menimbulkan perasaan senang dengan demikian akan menarik wisatawan untuk berkunjung (Neto, 2003).

Pengembangan pariwisata merupakan aktivitas yang memiliki tujuan untuk memajukan suatu daerah atau tempat baik melalui pemeliharaan maupun penataan dari obyek yang telah berkembang maupun menciptakan obyek baru. Sehingga pengembangan pariwisata yang berkaitan secara langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata tersebut (Neto, 2003; Streimikiene et al., 2021).

Pengembangan pariwisata juga merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata (Streimikiene et al., 2021).

Suatu tujuan pariwisata, harus meliputi lima unsur yang penting agar wisatawan dapat merasa puas dalam menikmati wisatanya yaitu atraksi, fasilitas, infrastruktur, transportasi dan *hospitality*/keramahan. Upaya pengembangan wisata hendaknya memenuhi kelima unsur di atas. Perbaikan atraksi, fasilitas, infrastruktur, transportasi ataupun keramahan memberi kenyamanan bagi wisatawan.

Di era modern saat ini, kenyamanan dan kesan baik pada suatu obyek wisata dapat dengan mudah dipromosikan menggunakan media sosial. Sebaliknya, penilaian negatif tentang lokasi wisata juga dapat dengan mudah tersebar dari testimoni wisatawan yang datang (Yuan et al., 2022). Proses pengembangan wisata tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Peran serta berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pariwisata suatu wilayah penting untuk terlibat supaya dapat meningkatkan kualitas lima unsur tersebut di atas.

Pengembangan wisata mempunyai arti penting untuk memperbaiki kualitas obyek wisata untuk menjaga kelangsungan kegiatan pariwisata karena wisata mempunyai beberapa manfaat. Manfaat tersebut diantaranya memberi peluang pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pendapatan, meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas masyarakat lokal, mengenali suatu wilayah bagi wisatawan dan sebagainya (Kawuryan et al., 2022; Neto, 2003).

Menurut Suwanto pola kebijakan pengembangan wisata meliputi:

- 1) Prioritas pengembangan obyek.
- 2) Pengembangan pusat-pusat penyebaran kegiatan wisatawan.
- 3) Memungkinkan kegiatan penunjang pengembangan obyek wisata

Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik

ditinjau dari segi tempat maupun benda -benda yang ada di dalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Pengembangan pariwisata adalah agar lebih banyak wisatawan datang pada suatu kawasan wisata, lebih lama tinggal, dan lebih banyak mengeluarkan uangnya di tempat wisata yang mereka kunjungi sehingga dapat menambah devisa untuk negara bagi wisatawan asing, dan menambah pendapatan asli daerah untuk wisatawan lokal. Disamping itu juga bertujuan untuk memperkenalkan dan memelihara kebudayaan di kawasan pariwisata tersebut.

Dengan demikian, pendekatan *Collaborative Governance* menjadi sangat relevan dan penting dalam pengembangan sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi dan kerjasama di antara berbagai aktor ini diperlukan agar pengembangan pariwisata dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Pendekatan *Collaborative Governance* memungkinkan para pemangku kepentingan untuk bekerja bersama-sama dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan kebijakan, dan mengelola sumber daya pariwisata dengan cara yang menguntungkan semua pihak. Ini juga memungkinkan berbagai perspektif dan pengetahuan untuk digabungkan, sehingga dapat ditemukan solusi terbaik untuk berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata. Selain itu, kolaborasi ini juga menciptakan rasa memiliki bersama terhadap destinasi pariwisata, yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pengembangan pariwisata.

Melalui pendekatan *Collaborative Governance*, pengambilan keputusan menjadi lebih inklusif, dan berbagai pihak memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan memiliki suara dalam proses tersebut. Hal ini dapat meningkatkan legitimasi



kebijakan dan program pariwisata di mata masyarakat, serta meminimalkan konflik yang mungkin timbul akibat ketidaksetujuan antara berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam mengembangkan sektor pariwisata, penerapan *Collaborative Governance* dapat menjadi landasan yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, menguntungkan, dan inklusif.

Dalam *Collaborative Governance*, terdapat beberapa elemen kunci yang memainkan peran penting dalam memastikan kesuksesan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan. Elemen-elemen ini termasuk aktor dan *stakeholder*, komunikasi antar-pihak, kepemimpinan kolaboratif, peraturan dan kebijakan, serta sumberdaya (Newig et al., 2018; Purdy, 2012; Siddiki et al., 2015; Silvia, 2011).

- a. *Aktor dan Stakeholder: Collaborative Governance* melibatkan berbagai aktor dan *stakeholder* yang memiliki kepentingan dalam suatu isu atau proyek tertentu. Ini bisa termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, kelompok masyarakat, akademisi, dan lain sebagainya. Aktor-aktor ini membawa beragam pengetahuan, sumber daya, dan perspektif ke meja perundingan. Identifikasi aktor dan stakeholder yang relevan adalah langkah awal penting dalam memulai kolaborasi yang efektif.
- b. *Komunikasi Antar-Pihak*: Komunikasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan adalah inti dari *Collaborative Governance*. Ini mencakup berbagi informasi, berdiskusi, mendengarkan pandangan orang lain, dan mencapai pemahaman bersama. Komunikasi yang terbuka dan jujur membantu mengatasi misinterpretasi dan membangun kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat. Kelancaran aliran informasi dan dialog yang terbuka adalah kunci kesuksesan dalam mencapai tujuan bersama.

- c. Kepemimpinan Kolaboratif: pada konteks *Collaborative Governance*, kepemimpinan tidak hanya berasal dari satu pihak, tetapi seringkali bersifat kolektif. Pemimpin kolaboratif adalah individu atau kelompok yang dapat memfasilitasi, mengoordinasi, dan memotivasi semua pemangku kepentingan untuk bekerja bersama. Mereka harus mampu mengelola konflik, mempromosikan tujuan bersama, dan menjaga semangat kolaborasi.
- d. Peraturan dan Kebijakan: Kerangka kerja yang jelas dalam bentuk peraturan dan kebijakan adalah landasan bagi *Collaborative Governance*. Ini mencakup peraturan yang mengatur hak dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, serta kebijakan yang mengarahkan arah dan tujuan kolaborasi. Peraturan dan kebijakan yang tepat dapat membantu mendorong kolaborasi yang berkelanjutan.
- e. Sumberdaya: Sumber daya, baik dalam bentuk finansial maupun manusia, sangat penting dalam *Collaborative Governance*. Setiap pemangku kepentingan harus menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Ini dapat mencakup alokasi anggaran, waktu, keahlian, dan tenaga kerja. Pengelolaan sumber daya dengan efisien dan adil adalah aspek kunci dalam kerjasama ini.

Elemen-elemen ini saling terkait dan saling mendukung untuk menciptakan lingkungan kerjasama yang berhasil. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk mencapai solusi yang lebih baik, berkelanjutan, dan inklusif untuk isu-isu kompleks yang memengaruhi masyarakat dan lingkungan.

Adapun kerangka pikir dalam skripsi ini dilihat sebagai berikut:



**Tabel 1. 3 Kerangka pikir**

Kerangka pikir penelitian ini digunakan sebagai landasan konseptual yang membimbing penyelidikan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan peran serta pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Wisata Bukit Lintang Sewu (Desa Muntuk Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul). Kerangka pikir ini memberikan dasar untuk mengidentifikasi aktor dan *stakeholder* yang terlibat, menggambarkan dinamika komunikasi antar-pihak, menganalisis peran kepemimpinan kolaboratif, mengevaluasi peran peraturan dan kebijakan dalam kolaborasi, dan menilai ketersediaan sumber daya yang mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Kerangka pikir ini akan membantu menjawab pertanyaan penelitian yang mendasari studi ini dan menyusun temuan serta rekomendasi yang relevan.

## 1.7 Definisi Konseptual

- a. **Governance** adalah proses pembuatan kebijakan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan melibatkan negara (pemerintah), sektor *privat* maupun masyarakat madani dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. *Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan 18 pemerintahan. Terdapat tiga pilar *governance* yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pemerintahan sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan.
- b. **Collaborative Governance** bisa diartikan sebagai kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab dimana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. Adanya kolaborasi dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul dikarenakan kompleksitas dan saling ketergantungan antar instansi. Pengelolaan obyek wisata bukit lintang sewu tidak dapat dijalankan oleh satu instansi saja karena untuk melaksanakannya melibatkan berbagai bidang yang berbeda-beda seperti keuangan, pelatihan, pemasaran, dan pembinaan sehingga dilakukan oleh beberapa pihak dengan kewenangan masing-masing.
- c. **Pengembangan Wisata** adalah usaha atau cara untuk menjadi lebih baik segala sesuatu yang dapat dilihat dan dinikmati oleh masyarakat sehingga semakin menimbulkan perasaan senang dengan demikian akan menarik wisatawan untuk berkunjung. Pengembangan wisata juda dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda - benda yang ada di dalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

## 1.8 Definisi Operasional

*Collaborative governance* dalam pengembangan wisata Bukit Lintang Sewu di Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Berikut adalah lima variabel penting yang menjadi fokus dalam pendekatan *collaborative governance*:

1. **Aktor dan Stakeholder:** Identifikasi aktor dan *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan wisata Bukit Lintang Sewu. Ini mencakup pemerintah daerah, masyarakat setempat, pemilik lahan, operator wisata, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Pengenalan aktor dan *stakeholder* memiliki peran dalam kolaborasi.
2. **Komunikasi Antar-pihak:** Variabel ini mencakup bagaimana komunikasi antara semua pihak terjadi. Ini termasuk saluran komunikasi, frekuensi pertemuan, dan alat komunikasi yang digunakan untuk berbagi informasi, ide, dan pandangan. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam *collaborative governance*.
3. **Kepemimpinan Kolaboratif:** Variabel ini mengevaluasi apakah terdapat kepemimpinan yang mendorong kolaborasi di antara berbagai aktor. Kepemimpinan yang kolaboratif mampu memotivasi pihak-pihak yang terlibat untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.
4. **Peraturan dan Kebijakan:** Menganalisis peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam pengembangan wisata tersebut. Variabel ini mencakup bagaimana peraturan dan kebijakan yang ada mempengaruhi kolaborasi antar-pihak dan apakah perlu adanya perubahan atau penyesuaian dalam peraturan yang ada.
5. **Sumberdaya:** Variabel ini mengacu pada sumberdaya yang digunakan bersama-sama oleh aktor dan *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan wisata Bukit Lintang Sewu. Ini bisa mencakup sumberdaya finansial, tenaga kerja, lahan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Pengelolaan sumberdaya bersama dengan adil dan efisien adalah salah

satu elemen penting dalam *collaborative governance*. Pada definisi operational terdapat Lima variabel penting yang menjadi fokus dalam pendekatan *collaborative governance* yang tersaji pada Tabel 1.3 berikut.

**Tabel 1. 4 Definisi Operasional**

No	Indikator	Parameter
1	Aktor dan <i>Stakeholder</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan/kontribusi Aktor dan <i>Stekholder</i> dalam pengembangan pariwisata, keberlanjutan dan pelestarian</li> <li>2. Komunikasi yang terjalin</li> <li>3. Anggaran yang dialokasikan</li> <li>4. Dukungan infrastruktur</li> <li>5. Kolaborasi</li> </ol>
2	Komunikasi Antar-pihak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman Kebutuhan dan Preferensi Wisatawan</li> <li>2. Pemasaran/promosi wisata dengan penggunaan teknologi</li> <li>3. Partisipasi masyarakat</li> <li>4. Kerjasama dengan pihak swasta</li> <li>5. Pendidikan/sosialisasi kesadaran lingkungan</li> </ol>
3	Kepemimpinan Kolaboratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesamaan tujuan, keterbukaan, dan pemahaman mendalam</li> <li>2. Kemampuan untuk memfasilitasi dialog, pertukaran ide, dan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan.</li> <li>3. Keterbukaan terhadap masukan</li> <li>4. Kesatuan dalam memfasilitasi dan kerjasama yang harmonis.</li> <li>5. Mengatasi konflik yang mungkin timbul.</li> </ol>

4	Peraturan dan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kejelasan peraturan dalam mengembangkan wisata</li> <li>2. Kualitas layanan wisata</li> <li>3. Kesejahteraan masyarakat lokal</li> <li>4. Edukasi dan pelatihan</li> <li>5. Kepemimpinan dan tata kelola</li> </ol>
5	Sumberdaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber daya alam potensial</li> <li>2. Sumber daya manusia yang terampil dan terlatih</li> <li>3. Infrastruktur yang mendukung</li> <li>4. Ketersediaan Akomodasi</li> <li>5. Fasilitas Rekreasi</li> </ol>

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif desain studi kasus yaitu melakukan penyelidikan dan menganalisa studi kasus secara mendalam. Kasus yang diteliti biasanya peristiwa, aktivitas, program, atau proses yang melibatkan individu atau kelompok (Creswell, 2018). Penelitian Kualitatif desain studi kasus dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang *Collaborative Governence* dalam pengembangan wisata di Bukit Lintang Sewu desa Muntuk Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.

### 1.8.2 Lokasi Penelitian

Peneliti tertarik memilih lokasi di Bukit Lintang Sewu Desa Muntuk Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul karena Bukit Lintang Sewu menawarkan keindahan wisata alam dan

destinasi yang menarik yaitu: melihat view Kota Yogyakarta dari atas, melihat bintang-bintang pada malam hari, dan juga menyediakan fasilitas untuk berkemah, serta menyediakan panggung terbuka untuk berbagai acara dan fasilitas glamping untuk menginap. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengenai *Collaborative Governance* dalam pengembangan wisata Bukit Lintang Sewu Di Balai KPH Yogyakarta Tahun 2017-2018 karena penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan pengembangan wisata yang lebih menganalisis peran dinas pariwisata, pihak swasta dan pengelola wisata dalam pengembangan wisata, selain itu hanya membahas strategi yang diterapkan.

### **1.8.3 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian dan analisis, dan dalam konteks ini, data dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama yaitu data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber asli. Proses pengumpulan data primer melibatkan penelitian lapangan, wawancara, dan observasi. Keuntungan dari data primer adalah bahwa mereka dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, sehingga peneliti memiliki kontrol penuh atas jenis data yang dikumpulkan. Selain itu, data primer juga cenderung lebih relevan dan akurat karena peneliti dapat merancang pertanyaan dan metode pengumpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda, dan peneliti menggunakan data tersebut untuk penelitian mereka sendiri. Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber, seperti lembaga pemerintah, lembaga penelitian, organisasi non-pemerintah, atau publikasi ilmiah. Keuntungan



utama dari data sekunder adalah ketersediaan yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pengumpulan data primer.

Adapun informan dan dokumen yang dipertimbangkan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 5 Informan dan dokumen yang dipertimbangkan**

No.	Informan (Jumlah)	Dokumen
1	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul (1 orang)	Rencana Pengembangan Wisata Lokal
2	Pengelola Wisata (2 orang)	Peraturan Daerah
3	KPH Yogyakarta (1 Orang)	Data jumlah wisatawan
4	Koperasi Notowono (1 Orang)	Laporan kerjasama
5	Wisatawan (5 orang)	Laporan evaluasi

#### **1.8.4 Alat Analisis Data**

NVivo 12 Plus adalah alat analisis data kualitatif yang sangat penting dalam penelitian multidisiplin. Tahapan penggunaan NVivo dapat diuraikan menjadi tiga langkah utama. Pertama, peneliti mengimpor data kualitatif ke dalam platform NVivo, yang bisa berupa teks transkripsi, audio rekaman, video, atau dokumen. Kedua, peneliti melakukan pengindeksan dan kategorisasi data dengan memberikan kode atau label untuk mengidentifikasi konsep, tema, atau kategori tertentu dalam data tersebut. Peneliti menandai atau mengode setiap potongan data yang relevan, memungkinkan untuk mengorganisir dan merumuskan hubungan antar data. Ketiga, NVivo memfasilitasi proses analisis data dengan fitur-fitur seperti pencarian teks yang kuat dan alat visualisasi yang memungkinkan peneliti untuk mencapai kesimpulan yang lebih mendalam dan akurat.

Selain itu, NVivo juga membantu peneliti dalam memahami dan menggali makna dari data kualitatif. Alat ini memungkinkan peneliti untuk menggali pola, tren, atau tema yang

mungkin tidak terlihat secara langsung. Selama proses analisis, peneliti dapat memvisualisasikan hubungan antar konsep atau tema dengan menggunakan alat seperti diagram konsep atau peta pikiran. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk visualisasi grafis atau laporan yang memudahkan komunikasi temuan penelitian.

Validitas data penelitian ini merujuk pada sejauh mana data yang dikumpulkan dalam penelitian mencerminkan secara akurat fenomena yang sedang diteliti atau konstruk yang sedang diukur. Dalam konteks analisis data kualitatif menggunakan NVivo 12 Plus, validitas data mencakup sejauh mana hasil analisis mencerminkan pemahaman yang tepat tentang data asli yang diimpor ke dalam perangkat lunak tersebut.

Validitas data dapat ditingkatkan dengan memastikan bahwa data awal diimpor dengan benar, pengkodean dan pengindeksan dilakukan secara konsisten dan akurat, dan analisis data dilakukan dengan metode yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, konsistensi dalam pemberian kode dan interpretasi temuan juga merupakan faktor yang memengaruhi validitas data. Untuk memastikan validitas data yang lebih tinggi, peneliti dapat melibatkan analisis data lain atau menggunakan teknik triangulasi dengan menggunakan lebih dari satu metode atau sumber data untuk menguji hasil analisis